

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pers

##### 1. Terminologi Pers

Istilah pers berasal dari kata *persen* Bahasa Belanda atau *press* dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan cetak pada lembaran kertas. Kata pers secara harfiah mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan pranata barang cetakan. Namun sekarang, kata pers atau *press* digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun elektronik.<sup>16</sup>

Maka, terdapat dua pengertian mengenai pers, yakni pers dalam arti kata sempit adalah segala hal yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan dalam arti kata luas, pers berarti segala hal yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik.<sup>17</sup>

Pada tahun 1956, aliran pemikiran teori pers, Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm menyebutkan empat bentuk teori pers yang berkembang, yaitu teori pers otoritarian, teori pers

---

<sup>16</sup> Edy Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 19.

<sup>17</sup> *Ibid.*

libertarian, teori pers tanggung jawab sosial, dan teori pers komunis.<sup>18</sup> Konsep empat bentuk teori tersebut muncul dalam rangka untuk menjelaskan perkembangan dan keadaan pers di dunia saat itu. Selain itu, pada tahun 1983 McQuail mengemukakan enam model pers yaitu authoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial, komunis Soviet, media pembangunan, dan media penyertaan demokratik.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menjelaskan tiga teori saja yang peneliti anggap relevan, yaitu Teori Authoritarian, Teori Libertarian, dan Tanggung Jawab Sosial.

## 2. Teori Pers

### a. Teori Pers Authoritarian

Dikembangkan di Inggris pada abad ke-16 dan ke-17, tujuannya adalah untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memberi layanan kepada negara. Mereka yang berhak menggunakan media yaitu siapa saja yang mendapat izin negara atau persetujuan semacam itu; dikontrol oleh persetujuan pemerintah, perusahaan kerja, perizinan, kadang kala penyaringan.<sup>20</sup>

Teori pers otoritarian berciri media sebagai alat propaganda pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam

<sup>18</sup>Wahyu Wibowo, 2009, *Menuju Jurnalisme Beretika : Peran Bahasa, Bisnis, dan Politik di Era Mondial*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Hlm. 172.

<sup>19</sup>Erman Anom, 2016, *Pemerintah, Media, dan Masyarakat di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta. Hlm. 84. Dalam <https://books.google.co.id/>.

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 84-85.

kehidupan masyarakat. Pers boleh mengeluarkan kritik sejauh tidak bertentangan dengan *status quo* rezim yang berkuasa.<sup>21</sup>

#### **b. Teori Pers Libertarian**

Teori pers liberal sebagai antitesa teori pers otoritarian memiliki ciri bahwa pers bukan pusat pemerintah dan dapat dimiliki secara pribadi. Pers bebas dimiliki dan dioperasikan siapapun.<sup>22</sup> Ciri-ciri teori pers libertarian adalah *pertama*, publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan; *kedua*, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi; *ketiga*, kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana; *keempat*, tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal; *kelima*, publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan.<sup>23</sup>

#### **c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial**

Teori pers tanggung jawab sosial merupakan pengembangan sekaligus kritik terhadap teori pers liberal. Prinsip penciptaan ruang publik (*public sphere*) menjadi dasar teori tanggung jawab sosial. Pers harus menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara

<sup>21</sup>Masduki, 2007, *Regulasi Penyiaran : Dari Otoriter ke Liberar*, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta. Hlm. 65.

<sup>22</sup>Masduki, *Op.Cit.* Hlm. 65-66.

<sup>23</sup>Satrio Saptohadi, Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Hlm. 131.

lewat media sebab kontrol media diletakkan pada opini masyarakat, yakni preferensi konsumen, dan standard professional.<sup>24</sup>

### 3. Pers Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa :

Pasal 1 Ayat (1)

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dahlan Subakti menjelaskan bahwa “definisi pers yang ditegaskan dalam UU Pers tersebut dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan atau bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintah, jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran”.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam bagian pertimbangan UU Pers tersebut menjelaskan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya

<sup>24</sup>Denis McQuail, 1987, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta. Hlm. 119.

<sup>25</sup> Dahlan Subakti, Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 serta Perkembangannya, dalam *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015. Hlm. 78.

berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

#### 4. Fungsi dan Peranan Pers

##### a. Fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Ahli

Pers memiliki fungsi yang cukup penting dalam penyebaran informasi publik. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)<sup>26</sup> mengatur tentang fungsi persyakni :

- 1) Media Informasi : bahwa pers dapat memberikan informasi mengenai segala hal, seperti hal-hal tentang politik, sosial, hukum ekonomi, budaya, dan lain sebagainya;
- 2) Media Pendidikan : bahwa pers dapat memberitakan edukasi pada masyarakat dalam segala hal;
- 3) Media Hiburan : bahwa pers dapat menyajikan pemberitaan yang menghibur dengan berisi konten yang membahagiakan dan mengundang kegembiraan;
- 4) Media Kontrol Sosial : bahwa pers mampu mengontrol perilaku tidak terpuji masyarakat pada umumnya, terutama pejabat sekaligus menjadi produsen bagi keputusan politik;
- 5) Lembaga Ekonomi, bahwa perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para warawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Fungsi tersebut dilakukan dalam suatu roda yang membentuk pendapat umum (*public opinion*). Oleh karena itu, pers memiliki

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) UU Pers yang menegaskan bahwa “*Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.*” Dilanjutkan dalam ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa “*disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.*”

peranan yang sangat besar dalam konteks pemberdayaan masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Wilbur Schramm sebagai media komunikasi, pers mempunyai tiga fungsi mendasar yaitu :

- 1) Memberi Informasi yang objektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi di dalam lingkungan negaranya, dan yang sedang terjadi di dunia;
- 2) Mengulas berita-beritanya dalam tajuk rencana dan membawa perkembangan menjadi fokus (sorotan);
- 3) Menyediakan jalan bagi orang yang akan menjual barang dan jasa untuk memasang iklan.<sup>28</sup>

Pers juga memiliki fungsi ideologis dan melakukan manuver politik sesuai dengan fungsi ideologisnya. Hal ini berkaitan dengan masalah siapa, kepentingan seperti apa, dan perspektif yang mana dapat memperoleh akses ke media. Pers juga memiliki fungsi sebagai pers yang bebas aktif, bahwa fungsi ini adalah fungsi paling esensial dari masyarakat yang mengklaim negaranya adalah negara demokratis.<sup>29</sup>

Berdasarkan fungsi-fungsi pers yang dipaparkan di atas, penulis menarik suatu pemahaman bahwa bukan hanya itu, pers juga diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat bermoral. Bukan hanya persoalan menghindarkan tirani, tetapi juga penghindaran terhadap “kebebasan

<sup>27</sup> Kukrit Suryo Wicaksono, Peran Pers dalam Peningkatan Daya Saing Daerah, dalam Jurnal Interaksi, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015. Hlm. 175.

<sup>28</sup> Wilbur Schramm, dikutip dari F. Rachmadi, 1990, *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di berbagai negara*, PT Gramedia, Jakarta. Hlm. 12.

<sup>29</sup> Rina Martini, Analisis dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi Politik di Indonesia, dalam Jurnal Ilmu Sosial, Volume 13, Nomor 2, Bulan Agustus, 2014. Hlm. 5-6.

pers” yang dikeluhkan menjadi “kebablasan pers”. Bagaimana dewasa ini, pers sering kali menjadi media yang menyajikan berita politik dan hiburan (seks) yang cenderung mengumbar berita yang provokatif, sensasional dan terjebak mengumbar kecabulan dan penghakiman seperti yang terjadi pada beberapa pemberitaan kasus pelecehan seksual serta cenderung merugikan semua pihak yang berada dalam pemberitaan tersebut.

**b. Peranan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Pers sangat besar perannya dalam menjamin dan aktualisasi demokrasi. Menurut Lowell, selain melaksanakan fungsi kontrol, peran besar pers dalam demokrasi sebagai komunikator rakyat terhadap penyelenggaraan negara dalam berdemokrasi. Sehingga menjadi penting untuk dijalankan demokrasi secara elitis, bukan pada sekelompok kecil orang.<sup>30</sup>

Pasal 6 UU Pers mengatur peranan mengenai pers, yaitu :

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui : bahwa mengetahui di sini adalah mengenai informasi akan perkembangan sebuah peristiwa atau kasus-kasus yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Namun tentu terbatas pada penginformasian tentang fakta kebenaran, masyarakat juga tidak bisa menuntut pers untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik seperti yang diatur dalam Pasal 5 KEJ mengenai identitas korban dan pelaku yang berstatus anak tidak boleh disebarluaskan;

---

<sup>30</sup> Dewan Pers, Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers, dalam Jurnal Pers Edisi 14, Juni, 2017. Hlm. 19.

- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan (pluralism);
- 3) Mengembangkan pendapat umum;
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran;
- 5) Memperjuangkan keadilan kebenaran.<sup>31</sup>

Peranan tersebut diwujudkan dalam suatu publikasi informasi yang dapat berupa sebuah pemberitaan mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan negara dimana pers itu berada atau yang sedang terjadi di dunia internasional.

## **B. Bentuk-Bentuk Berita Media Massa dan Akibat Hukumnya**

Pers dalam bertindak tidak boleh menyalahgunakan kebebasannya.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa :

Pasal 7 ayat (2)

“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

Berbicara mengenai profesi dan kode etik artinya menyangkut masalah profesionalisme media dalam menyampaikan pemberitaan karena perkembangan teknologi informasi membuat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sangat cepat sehingga diperlukan sebuah benteng khusus untuk melindungi masyarakat dari akibat pemberitaan yang keliru.<sup>32</sup> Sebelum membahas terkait bagaimana perlindungan yang wajib pers berikan kepada

<sup>31</sup> Dalam penjelasan Pasal 6 UU Pers dipaparkan bahwa Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

<sup>32</sup> Dewan Pers, *Op.Cit.* Hlm. 29-30.



narasumbernya, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk berita menurut Djuroto, yaitu :

1. Berita Selebaran : bahwa berita jenis ini disiarkan secara cepat atau kilat;
2. Berita Majalah : bahwa berita yang jenis pemberitaannya berkala dan teratur;
3. Berita Penerangan : berita jenis ini mengandung penjelasan lebih lanjut dari suatu berita yang sudah disiarkan, atau penjelasan yang bertitik tolak dari berita yang sudah disajikan, tetapi sangat terkait dengan waktu;<sup>33</sup>

Selanjutnya mengenai kategori berita yang ditinjau dari faktor kesalahan dan kurang telitinya pers memperoleh dan mempublikasikan informasi, yaitu :

1. Berita yang Merugikan : biasanya berisi konten yang berupa fakta-fakta mengenai informasi seseorang dan merugikannya. Misalnya, pemberitaan mengenai kondisi seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual pasca terjadinya kejahatan tersebut, penyebarluasan identitas, dan sebagainya;
2. Berita yang Salah : berisi konten yang salah karena ketidakakuratan pers emncari dan mengolah isi berita sebelum dipublikasikan;
3. Berita Bohong : berisi konten yang berupa fitnah terhadap seseorang atau suatu lembaga atau perusahaan tertentu;
4. Berita yang Menghakimi : biasanya berisi konten mengenai kejadian suatu perkara, pers bertindak seolah-olah sebagai pengadilan, dan memberikan vonis terhadap seseorang sebelum dapat dibuktikan secara hukum oleh putusan pengadilan.<sup>34</sup>

Terhadap kategori berita yang disampaikan dalam mediamassa di atas perlu adanya suatu mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan tersebut. Mengenai perlindungan tersebut telah diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik secara tegas, lebih khususnya mengenai pemberitaan seorang anak baik yang menjadi pelaku ataupun korban kasus pelecehan seksual yang tercantum dalam Pasal 5

---

<sup>33</sup> Toto Djuroto dan Bambang Supriadi, 2003, *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 28.

<sup>34</sup> *Ibid*.

ayat (1) UU Pers dan Pasal 4 dan Pasal 5 KEJ. Bahwa salah satu fungsi dari pers adalah fungsi kontrol sosial, masyarakat berhak mengontrol pers dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi yang mana dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 1 ayat (12) UU Pers menjelaskan mengenai pengertian dari kedua hak tersebut.

Pasal 1 ayat (11)

“Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Pasal 1 ayat (12)

“Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”.

Kedua hak tersebut memiliki banyak manfaat dan fungsi dalam menjaga hubungan baik antara media dan narasumber. Masyarakat akan mengetahui bahwa media tersebut merupakan media yang independen serta membuka dan menghargai hak setiap orang untuk menggunakan hak jawabnya.<sup>35</sup>

Masyarakat dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi untuk memperjuangkan perlindungan terhadapnya apabila pers memberitakan suatu berita yang termasuk dalam kategori merugikan dan menghakimi

---

<sup>35</sup> Apriani Novitasari, *Pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Studi Kasus di Harian Tribun Medan)*, sebuah Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017 dimuat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/>. Hlm. 7.

dirinya. Khususnya hak koreksi dapat digunakan oleh masyarakat untuk membela haknya atas pemberitaan yang salah, berita bohong, dan berita yang merugikan atas dirinya. Selain itu, peneliti berpandangan bahwa hak jawab, hak tolak, dan hak koreksi merupakan bentuk pertanggungjawaban media terhadap sesuatu yang ditulis dan disebarkannya secara publikasi massa dan menjadi alternatif untuk pengajuan protes oleh narasumber untuk pemberitaan tentang fakta yang terjadi pada narasumber dan merugikannya serta sebagai ralat apabila ada sesuatu yang salah atas pemberitaan terhadap dirinya.

Peneliti berpandangan bahwa penggunaan hak jawab dan hak koreksi harus digunakan pers sebagai kewajibannya untuk mengoreksi atau mengubah beritanya sesuai dengan kebenaran, bukan berasal dari persepsi dan informasi yang salah.

### **C. Kode Etik Jurnalistik dan *Trial By The Press***

#### **1. Macam-Macam Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik**

Etika menjadi syarat mutlak bagi insan media dalam menyajikan berita bagi masyarakat. Kode etik merupakan rambu-rambu landasan moral, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah bagi wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan atau jurnalis merupakan sebuah profesi. Oleh karena itu, jurnalis dituntut untuk menerapkan etika profesi dalam

menjalankan profesinya. Bekerja tanpa kode etik menunjukkan seseorang tidak profesional.<sup>36</sup>

Terdapat enam bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan masing-masing pasal yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Berikut penguraianya :

- a. **Pelanggaran terhadap Asas Praduga Tak Bersalah**, bahwa pers mencampurkan fakta dan opini, tidak menguji informasi dan melanggar asas praduga tak bersalah : melanggar ketentuan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
- b. **Pelanggaran terhadap Berita yang Akurat**, bahwa pers menyajikan berita yang tidak akurat, berita berisi konten sadis, cabul dan kebohongan : pelanggaran ketentuan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
- c. **Pelanggaran terhadap identitas pelaku dan korban yang berstatus anak**, bahwa pers tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyembunyikan identitas pelaku kejahatan di bawah umur : melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia tidak

---

<sup>36</sup> William Wijaya Thomas, Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur, dalam Jurnal e-Komunikasi, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015. Hlm. 4.

menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;

- d. **Pelanggaran terhadap penyalahgunaan porfesi**, bahwa pers tidak profesional dalam mencari informasi untuk beritanya : melanggar ketentuan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
- e. **Pelanggaran terhadap hak tolak dan hak narasumber**, bahwa pers menyajikan berita yang tidak jelas narasumber dan mengabaikan hak narasumber : melanggar ketentuan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.;
- f. **Pelanggaran terhadap imparsialitas**, bahwa pers menyajikan berita yang tidak berimbang dan diskriminatif : melanggar ketentuan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pers memiliki kewajiban untuk selalu memerhatikan dan menaati kode etik jurnalistiknya. Pelanggaran terhadap pasal-pasal di atas merupakan hal yang dapat dinyatakan bahwa pers menunjukkan ketidakprofesionalannya dalam mengolah dan menyampaikan berita sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya. Pers harus menggunakan ahti nurani tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain, bersikap objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun.

## 2. *Trial By The Press*

*Trial by the press* atau terjemahannya secara harfiah “pengadilan oleh pers” sebagaimana dikutip dalam laporan penelitian hukum BPHN tahun 2013 merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Secara teori, pers dianggap telah melakukan *trial by the press* ketika dengan adanya<sup>37</sup>

Pemberitaan mengenai sebuah dugaan kasus pidana yang sudah ditangani aparat penyidik (*pre-trial publicity*) hingga masuk ke pengadilan (*publicity during trial*) menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dan dipojokkan pada posisi yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak (*fair trial*).<sup>38</sup>

Senada dengan pengertian tersebut, Janet Steele sebagaimana dikutip dari (Bruschke & Loges 2004; Kando 1990; Landau 1976; Stabile 1990), menulis :

<sup>37</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa, Jurnal Advokasi, Volume 5, Nomor 2, September 2015, 123-128. Hlm 126.

<sup>38</sup> BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. Cit.*

*“In the United States, when journalists, social scientists, or legal scholars use the term “trial by the press,” it is usually in the context of pretrial publicity, and the First Amendment right to freedom of expression versus the Sixth Amendment right of the accused to a fair trial.”* (Trial by the press biasanya digunakan dalam konteks pre-trial publicity dan Amandemen pertama mengenai hak kebebasan berekspresi versus Amandemen keenam tentang hak-hak tersangka untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak).<sup>39</sup>

*Trial by the press effects* jauh lebih ampuh dibandingkan *trial by the court*. Ada banyak penyebab mengapa *trial by the press* kini seolah menjadi panglima penegak hukum di negeri ini dikarenakan yaitu :

*Pertama*, Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kasus suap dan korupsi yang menimpa para penegak hukum semakin memberikan stigma negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia, sehingga publik pun meragukan kinerja mereka.<sup>40</sup>

*Kedua*, regulasi yang justru semakin membuka peluang terjadinya *trial by the press*. Angin reformasi yang melahirkan berbagai undang-undang mengenai pers semakin menasbihkan kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan yang bahkan batasannya pun masih bias. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin memberikan kesempatan bagi pers untuk mendapat informasi dengan bebas dan menyampaikannya kepada masyarakat tanpa filter sedikit pun.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Janet Steele, “*Trial by the Press*”: An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia”, *The International Journal of Press/Politics*, 18 (3) 342 –359, July 2013. Hlm. 342-343.

<sup>40</sup> Pebri Purwanto, 2014, *Trial By The Press: Kebebasan Pers atau Keablasan Pers?*, LPM Gema Keadilan, Semarang. Hlm. 8.

<sup>41</sup> *Ibid.* 9.

*Ketiga*, rendahnya pendidikan politik di masyarakat. Harus diakui, masyarakat kita masih sering mencerna sebuah informasi secara mentah-mentah tanpa disaring terlebih dahulu. Hal ini tentu berbahaya karena apabila informasi yang disampaikan itu jauh dari fakta yang ada di lapangan, maka masyarakat seolah diarahkan untuk menarik kesimpulan yang menyudutkan pihak-pihak tertentu.<sup>42</sup>

*Keempat*, memiliki jaringan yang luas dan mudah diakses. Luasnya jaringan pers yang bisa menjangkau seluruh tempat dan kalangan adalah kekuatan pers modern. Melalui media online dan sosial media pers mampu menyebarkan berita mereka dalam waktu yang singkat, mengesampingkan apakah berita itu objektif atau tidak.<sup>43</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Konsep hukum Indonesia menyebutkan terdapat beberapa perbedaan penyebutan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*Straftbaarfeit*” atau *Delict*. Berikut akan dijelaskan beberapa pendapat dari sarjana mengenai tindak pidana, yaitu :

---

<sup>42</sup>*Ibid.* Hlm. 9.

<sup>43</sup>*Ibid.*



- a. Menurut Roeslan Saleh : perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>44</sup>
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro : tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>45</sup>
- c. Menurut Tresna, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>46</sup>
- d. Menurut Simon, *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Askara Baru. Hlm. 53.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Moeljatno. 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 56.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam oleh pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan.<sup>48</sup>

Menurut Lamintang, tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang berada di dalam diri pelaku atau berkaitan dengan keadaan batin seseorang) dan unsur objektif (unsur yang berada di luar diri pelaku, berkaitan dengan di mana dan kapan pelaku melakukan tindak kejahatannya), berikut penjelasannya :

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah :
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
  - 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*);
  - 3) Merencanakan terlebih dahulu (*voobedache raad*);
  - 4) Perasaan takut (*vrees*).
- b. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :
  - 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
  - 2) Kualitas diri pelaku;
  - 3) Kausalitas.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 122.

<sup>49</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti. Hlm. 194.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku.

### 3. Tindak Pidana Pers

Menurut Bambang Sadono, suatu delik baru dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai delik pers, jika perbuatan kejahatan tersebut mengandung pernyataan pikiran atau perasaan seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan).<sup>50</sup>

Dasar pengaturan pidana pers dalam Undang-Undang 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Peraturan Pidana di Seluruh Wilayah Indonesia atau KUHP, yaitu :

- a. Delik terhadap Kesusilaan atau Delik Pornografi : yang termasuk dalam kawasan ini ialah Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 KUHP;
- b. Delik Penyiaran Kabar Bohong : awalnya pengaturan tentang delik ini tercantum dalam Pasal 171 KUHP<sup>51</sup> yang kemudian dihapus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 8 butir 37, kemudian diganti dengan Pasal 14<sup>52</sup> dan Pasal 15<sup>53</sup> di Undang-Undang yang sama.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Bambang Sadono, *Op. Cit.* hlm. 60.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 8 butir 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirobah sebagai berikut: "*Pasal 171 dihapuskan.*"

<sup>52</sup> Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menegaskan bahwa :

- (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Selain dalam KUHP, delik pers dapat ditemukan dalam UU Pers yang mengatur terkait suatu perbuatan pers yang diancam dengan pidana yaitu pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 13. Yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers menegaskan bahwa :

Pasal 18 ayat (2)

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 18 ayat (3)

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”.

Bambang Sadono juga menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi tindak pidana pers adalah sebagai berikut :

- a. Penulis (pengarang);
- b. Penggambar (pelukis atau pemotret);
- c. Penerbit;
- d. Pencetak;
- e. Redaktur.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

<sup>54</sup> Bambang Sadono, *Op.Cit.* Hlm. 61.

<sup>55</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. Hlm. 138.

## E. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual terhadap Anak

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut Ricard J. Gelles dalam Hurairah, 2012, “kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial”.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan “hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku”.<sup>56</sup>

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Menurut Lyness dalam Maslihah, 2006, “kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya”.<sup>57</sup>

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa :

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;

<sup>56</sup>Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, dalam Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015. Hlm. 15.

<sup>57</sup>*Ibid.* Hlm. 16.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.<sup>58</sup>

Peneliti menggunakan definisi menurut pasal tersebut hanya untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian terhadap kekerasan seksual saja, tidak untuk menjerat pelaku yang ada dalam pemberitaan yang diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti :

- a. Pemaksaan melakukan kegiatan seksual;
- b. Pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas;
- c. Lelucon yang diasukai pelaku; dan
- d. Juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual.<sup>59</sup>

Tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup> Pelecehan seksual biasanya merupakan istilah dalam masyarakat untuk menggambarkan suatu tindak kekerasan seksual.

M. Sudrajat Bassar menjelaskan pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan untuk delik sendiri

<sup>58</sup> Lihat Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga.

<sup>59</sup> N.K Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya, *Savy Amira Women;s Crisis Center*. Hlm. 1.

<sup>60</sup> *Ibid*.

merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia kesusilaan.<sup>61</sup>

Menurut Collier, “pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut. Sedangkan menurut Rubenstein, pelecehan seksual sebagai sifat pelaku yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima”.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti lebih memilih istilah pelecehan seksual dikarekan dalam pemberitaan oleh pers yang dikaji dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan istilah tersebut.

## **F. Tinjauan Konsepsional tentang Viktimologi dan Korban**

### **1. Terminologi Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>63</sup> Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris

<sup>61</sup> M. Sudrajat Bassar, 1968, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya. Hlm. 170.

<sup>62</sup> Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Jakarta, Tiara Wacana. Hlm. 60.

<sup>63</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm 43.

*Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.<sup>64</sup>

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.

<sup>65</sup>

## 2. Viktimologi Menurut Para Ahli

Viktimologi menurut beberapa ahli, berikut penjelasannya :

- a. Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek;
- b. Menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>66</sup>

Tujuan viktimologi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang

<sup>64</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm 228.

<sup>65</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.* Hlm. 44-45.

<sup>66</sup> J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung. Hlm. 158.



mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.<sup>67</sup>

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

### 3. Pengertian Korban

#### a. Pengertian Korban Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pengertian korban menurut beberapa ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 ayat (3)

*“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.*

- 2) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>67</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan · Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, RajaGrafindo. Persada, Jakarta. Hlm. 33.

*“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”*

Berdasarkan uraian pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum di atas, peneliti menarik suatu pemahaman bahwa terjadi perbedaan pengertian dan lebih memilih untuk menggunakan pengertian korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **b. Pengertian Korban Menurut Para Ahli**

Pengertian korban menurut para ahli dan yang bersumber dari Konvensi Internasional mengenai Korban Tindak Pidana yang menimpa dirinya, yaitu :

- 1) Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan;<sup>68</sup>
- 2) Menurut Bambang Waluyo, korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas suatu perbuatan atau usaha melanggar ringan dilakukan oleh pelaku kejahatan;<sup>69</sup>
- 3) Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, dan gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental;<sup>70</sup>
- 4) Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Bambang Waluyo, *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan

<sup>68</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.* hlm 63.

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika. Hlm. 9

<sup>70</sup> Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 108.

fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>71</sup>

- 5) Menurut van Boven, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”.<sup>72</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa korban adalah seseorang yang telah mendapat penderitaan fisik, mental, emosional, kerugian harta benda yang diakibatkan oleh suatu tindakan orang lain yang melanggar hak-hak fundamentalnya untuk kepentingan sendiri atau hak asasi yang dirugikan.

---

<sup>71</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*

<sup>72</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51.